



tanjak



**Potret BA 025,
Salah Satu Entitas
Pelaksanaan Anggaran
dengan Pagu Besar di
Sumatera Selatan**

**Perkembangan
Ekonomi di Sumatera
Selatan**

**Koperasi Desa Merah
Putih: Jalan Baru
Menuju Ekonomi
Rakyat yang Mandiri**

**Nostalgia Peradaban
Palembang di Museum
Balaputra Dewa**





KEMENTERIAN KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

Dengan dukungan
Bapak/Ibu beserta
jajaran, kami
berkomitmen
memberikan
***layanan sepenuh
hati*** melalui
***birokrasi yang
bersih dan tanpa
biaya*** (Rp0).

PENGARAH

Kepala Kanwil DJPb
Provinsi Sumatera Selatan

PENANGGUNGJAWAB

Kepala Bagian Umum Kanwil DJPb
Provinsi Sumatera Selatan

KONTRIBUTOR TULISAN

Lamhot Hasiholan Parhusip, M. Telly Anggra
Syaputra, Muhammad Ikhsan, Safira Putri
Anugrah, Sephira Audrey, Suci Amalia Putri,
Yudho Bintoro Sandi, Yustri Marianti

DESAIN GRAFIS DAN LAYOUT

Nur Rahma Kartika, Sephira Audrey

SEKRETARIAT

Subbagian Tata Usaha dan Rumah Tangga Kanwil
DJPb Provinsi Sumatera Selatan



Daftar Isi

Pengantar Redaksi	4
Perkembangan Ekonomi	5
Central Government Advisory	6
Potret BA 025, Salah Satu Entitas Pelaksanaan Anggaran dengan Pagu Besar di Sumatera Selatan	
Local Government Advisory	9
Koperasi Desa Merah Putih: Jalan Baru Menuju Ekonomi Rakyat yang Mandiri	
Pesona Sumsel	11
Nostalgia Peradaban Palembang di Museum Balaputra Dewa	
UMKM Kami	16
Kriya Cantik dari Ayib Handmade	
Teka-Teki Etdah~	17
Kanal Bebas	19
<i>ASN Bermartabat, Negara Bermartabat: Refleksi Kode Etik di Kementerian Keuangan</i>	
<i>Cross Function dari Penjaga Gerbang Perekonomian Negara menjadi Pengawal Jantung Perbendaharaan Negara</i>	
Komik Tanjak	22
Ep 08: Cara Pintar, Pegawai Pintar	
Kolase Triwulanan	25

Buletin tanjak menerima kiriman tulisan/naskah yang dimuat pada volume berikutnya (rubrik kanal bebas). Naskah dapat dikirimkan langsung ke alamat redaksi atau alamat email di bawah.

ALAMAT REDAKSI

Kanwil DJPb Sumsel
Gedung Keuangan Negara, Jl. Kapten A. Rival No. 2, Sungai Pangeran, Kec. Ilir Tim. I, Kota Palembang, Sumatera Selatan 30129

EMAIL

kanwildjbn.sumsel@kemenkeu.go.id

Kritik dan saran dapat disampaikan via email tersebut di atas.





Pengantar *Redaksi*

Salam hangat bagi para pembaca tanjak,

Memasuki triwulan kedua tahun 2025, tantangan efisiensi anggaran mulai menjadi perhatian utama dalam menjaga kesinambungan pembangunan dan pelayanan publik. Dinamika ekonomi daerah pun terus bergerak, menuntut respons yang adaptif dan kolaboratif dari seluruh pemangku kepentingan.

Di edisi ke-14 ini, buletin tanjak (Catatan dan Jejak) menghadirkan sorotan strategis terhadap perkembangan ekonomi Sumatera Selatan hingga triwulan II 2025, termasuk potret BA 025 sebagai salah satu entitas dengan pagu besar. Disajikan pula cerita inspiratif dari Koperasi Desa Merah Putih yang menjadi model ekonomi rakyat, serta napak tilas sejarah Museum Balaputra Dewa yang menyimpan jejak peradaban Palembang.

Kami mengajak pembaca untuk terus menguatkan sinergi dan peran strategis sebagai TREFA, menyambut setiap tantangan dengan solusi yang inklusif, inovatif, dan berkelanjutan.

Selamat membaca, dan semoga edisi ini memberi wawasan serta inspirasi bagi kita semua.



Rahmadi Murwanto
Kepala Kantor Wilayah
DJPb Provinsi Sumatera
Selatan

Dashboard Kinerja Ekonomi s.d. 31 Juni 2025

Indikator Makro Ekonomi & Kesejahteraan



Perkembangan indikator makroekonomi dan kesejahteraan Sumsel hingga Maret 2025 tetap dalam tren yang **positif**. Semua indikator kesejahteraan mengalami perbaikan dibandingkan periode sebelumnya.

Tabel I-Account APBN Sumsel Juni 2024-2025

Uraian (Rp Miliar)	s.d. Juni 2024			s.d. Juni 2025			
	Target/Pagu	Realisasi	%	Target/Pagu	Realisasi	%	Growth (%)
A. PENDAPATAN NEGARA	22.455,30	6.366,56	28,35%	17.877,44	6.825,49	37,06%	4,07%
I. Penerimaan Perpajakan	20.074,82	4.904,87	24,43%	15.471,69	5.300,60	34,26%	8,07%
1. Penerimaan Pajak	19.743,59	4.753,68	24,08%	15.213,59	5.043,64	33,15%	6,10%
2. Kepabeanan & Cukai	331,22	151,19	45,65%	258,10	256,97	99,56%	69,97%
II. PNPB	2.380,48	1.461,69	61,40%	2.405,74	1.324,89	55,07%	-9,36%
B. BELANJA NEGARA	53.355,15	22.510,99	42,19%	49.429,22	19.923,17	40,31%	-11,50%
I. Belanja Pemerintah Pusat	21.097,86	8.181,86	38,78%	15.789,68	5.381,90	34,08%	-34,22%
II. Transfer ke Daerah	32.257,30	14.329,13	44,42%	33.639,54	14.541,27	43,23%	1,48%
C. SURPLUS/DEFISIT	-30.899,85	-16.144,43	52,25%	-31.551,79	-13.297,68	42,15%	-17,63%

Sumber: Laporan ALCo Bulan Juli 2025

Hingga Juni 2025, Pendapatan negara mengalami pertumbuhan, sementara belanja negara berkontraksi. Transfer ke daerah dan belanja sosial tetap menjadi pilar penting kesinambungan fiskal di Sumsel. Kinerja pendapatan didorong oleh peningkatan setoran masa PPN dan PPh Badan dari komoditas unggulan, serta ditopang oleh kenaikan harga patokan ekspor (HPE) dan meningkatnya volume ekspor produk CPO dan turunannya. Kebijakan efisiensi anggaran (Inpres No. 1 Tahun 2025) masih menjadi faktor utama yang mempengaruhi kinerja belanja K/L khusus nya belanja barang dan belanja modal.



Potret BA 025, Salah Satu Entitas Pelaksanaan Anggaran dengan Pagu Besar di Sumatera Selatan

oleh Bidang Pembinaan Pelaksanaan Anggaran I

Dalam lima tahun terakhir, pagu APBN untuk wilayah Sumatera Selatan menunjukkan tren pertumbuhan yang konsisten dengan rata-rata kenaikan sebesar 11,36% per tahun. Peningkatan tertinggi terjadi pada tahun 2024, yakni sebesar 24,63% (yoy) sementara pertumbuhan terendah terjadi pada tahun 2022 yang berkontraksi sebesar -4,72% (yoy) seiring dengan kebijakan konsolidasi fiskal untuk menjaga kesinambungan APBN pasca pandemi Covid-19. Adapun pada tahun 2025 ini, alokasi APBN di Sumsel yang meliputi Bagian Anggaran (BA) Bendahara Umum Negara (BUN) dan BA Kementerian/Lembaga (K/L) secara total mencapai Rp49,4 triliun.

Salah satu bagian anggaran K/L dengan pagu besar yang ada di Sumatera Selatan adalah BA 025, yaitu Kementerian Agama. Proporsi pagu pada BA 025 ini sangat signifikan, yakni sebesar Rp1,38 triliun, termasuk dalam lima bagian anggaran dengan pagu terbesar di Sumatera Selatan. Beberapa fungsi penting yang dijalankan antara lain terkait dengan haji dan umrah, pendidikan madrasah dan pendidikan keagamaan, dan pembinaan kerukunan umat beragama.

Alokasi pagu APBN pada BA 025 diperuntukkan untuk membiayai belanja pada lima program yang terdiri dari

Program Dukungan Manajemen, Program Kerukunan Umat dan Layanan Kehidupan Beragama, Program Pendidikan Tinggi, Program Kualitas Pengajaran dan Pembelajaran, dan Program PAUD dan Wajib Belajar 12 Tahun. Alokasi terbesar, yaitu mencapai 70% pagu, berada pada Program Dukungan Manajemen. Sementara itu, pada program teknis, alokasi terbesar terdapat pada Program Pendidikan Tinggi.

Selain bersumber dari rupiah murni, belanja APBN pada BA 025 juga bersumber dari PNBPN, SBSN, dan hibah. BA 025 juga mengelola bantuan sosial berupa Bansos KIP Kuliah yang disalurkan melalui satker UIN Raden Fatah Palembang, satker BLU di lingkungan BA 025. Keseluruhan pagu APBN pada BA 025 didistribusikan kepada 146 satuan kerja (satker) yang tersebar mulai dari tingkat provinsi sampai dengan seluruh kabupaten/kota di Sumatera Selatan.

Kinerja pelaksanaan anggaran BA 025 yang diukur dengan nilai IKPA selalu menunjukkan capaian yang baik. Hingga akhir triwulan IV tahun 2024, nilai rata-rata IKPA mencapai kategori sangat baik yaitu 95,11. Dari 146 satker yang berada dibawah BA 025, sebanyak 80 satker masuk kategori sangat baik, 63 satker kategori baik, 3 satker kategori cukup, dan tidak ada satker dalam kategori kurang.



Dari seluruh indikator IKPA, terdapat 2 indikator yang masih mempunyai banyak ruang untuk peningkatan, yaitu deviasi Halaman III DIPA dan dispensasi SPM.

Salah satu kendala dalam pelaksanaan anggaran di BA 025 adalah munculnya pagu minus yang hampir selalu terjadi setiap akhir tahun anggaran. Pagu minus ini umumnya muncul pada belanja pegawai, karena sifat pagu belanja pegawai yang terbuka. Pagu minus di akhir tahun anggaran merupakan salah satu permasalahan yang dapat mengganggu kelancaran kegiatan satker. Seringkali, penyebab utama dari kondisi ini adalah kesalahan dalam perencanaan anggaran, revisi anggaran yang tidak tepat waktu, serta kendala dalam pencatatan dan pelaporan.

Diperlukan upaya serius agar kondisi pagu minus tidak terus berulang setiap tahun di BA 025 Sumatera Selatan. Salah satu langkah yang dapat dilakukan adalah mewajibkan penyusunan rencana penyerapan anggaran yang lebih akurat. Setiap satker di lingkungan BA 025 perlu menyusun perencanaan arus kas (*cash flow planning*) yang realistis dan berbasis historis, sehingga kebutuhan anggaran dapat diproyeksikan dengan lebih akurat. Pendekatan *baseline budgeting* perlu dioptimalkan agar tidak ada alokasi anggaran yang kurang atau berlebihan dibandingkan realisasi sebelumnya. Selain itu, penetapan batas waktu revisi anggaran perlu dipertimbangkan untuk dimajukan, misalnya maksimal pada triwulan III, sehingga tidak ada perubahan mendadak yang menyebabkan terjadinya pagu minus. Terakhir, setiap revisi anggaran yang berpotensi menyebabkan pagu minus perlu untuk diwajibkan mendapatkan persetujuan lebih ketat dari Kementerian Keuangan.

Tantangan besar lainnya dalam pelaksanaan anggaran BA 025 adalah jumlah satker yang cukup besar, yaitu sebanyak 146 satker yang tersebar hingga kabupaten/kota. Banyaknya jumlah satker ini memunculkan beberapa isu dalam pelaksanaan anggaran, terutama terkait dengan inefisiensi dan kurangnya jumlah SDM yang kompeten untuk menjalankan fungsi pelaksanaan anggaran.

Efisiensi pelaksanaan anggaran saat ini merupakan isu penting yang terus digaungkan oleh pemerintah. Dalam konteks ini, jumlah satker yang besar di lingkungan BA 025 menjadi hal yang menarik untuk dilihat dari sudut pandang efisiensi. Semakin banyak jumlah satker, semakin besar pula alokasi belanja operasional. Hal ini setidaknya dapat terlihat dari alokasi belanja pada Program Dukungan Manajemen pada BA 025 yang masih mencapai sekitar 60% dari keseluruhan pagu, yang antara lain digunakan untuk membiayai operasional pengelolaan keuangan yang ada di setiap satker. Oleh karena itu, upaya efisiensi dalam bentuk penggabungan satker dan sentralisasi pagu terus diupayakan di BA 025 merupakan salah satu langkah strategis untuk meningkatkan efisiensi pelaksanaan anggaran.

Selanjutnya, jumlah satker yang besar tentu membutuhkan jumlah SDM yang memadai dan memenuhi standar kompetensi untuk melaksanakan tugas pelaksanaan anggaran. Hal ini menjadi tantangan tersendiri, mengingat sebagian besar satker merupakan satker yang relatif kecil yang mempunyai sedikit SDM dalam pengelolaan keuangan misalnya pada satker Madrasah. Saat ini upaya optimalisasi SDM yang sedang dilakukan adalah dengan memberdayakan tenaga pegawai PPPK

untuk membantu pelaksanaan tugas terkait dengan pelaksanaan anggaran, tentunya dengan memperhatikan batas kewenangan yang dapat dibebankan kepada pegawai berstatus PPPK.

Salah satu terobosan yang sedang diujai oleh satker Madrasah untuk mengatasi keterbatasan SDM dalam pengelolaan keuangan adalah dengan memberikan pelajaran tambahan kepada peserta didik mengenai pengelolaan keuangan negara. Diharapkan, peserta didik tidak hanya memperoleh pengetahuan tambahan, tetapi juga dapat mempraktikkannya secara langsung dalam pengelolaan keuangan di sekolah, sehingga sekaligus membantu proses pelaksanaan anggaran

di madrasah. Gagasan tersebut tentu memerlukan kerja sama yang baik dengan Kementerian Keuangan agar dapat berjalan sesuai koridor ketentuan yang berlaku.

Terakhir, di tengah berbagai kondisi dan tantangan dalam pelaksanaan anggaran yang dihadapi oleh para satker BA 025 di Sumatera Selatan, koordinasi yang baik terus terjaga dengan Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Sumatera Selatan beserta KPPN selaku BUN. Hal ini merupakan modal penting agar pelaksanaan anggaran di lingkungan BA 025 di Sumatera Selatan dapat selalu berjalan lancar dan akuntabel sesuai ketentuan yang berlaku. Semoga.

Koordinasi Pelaksanaan Anggaran BA 025 dengan Kanwil Ditjen Perbendaharaan Sumsel





Koperasi Desa Merah Putih: Jalan Baru Menuju Ekonomi Rakyat yang Mandiri

oleh Yudho Bintoro Sandi

Koperasi sebagai Pilar Ekonomi Rakyat dari Desa

Gagasan membentuk 80.000 Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih menjadi strategi monumental dalam membangun kemandirian ekonomi rakyat dari bawah. Instruksi Presiden No. 9 Tahun 2025 mempertegas arah pembangunan yang berbasis desa, dengan menempatkan koperasi sebagai pusat produksi, distribusi, dan pembiayaan masyarakat desa. Langkah ini tidak hanya menjawab persoalan klasik seperti distribusi yang panjang dan maraknya tengkulak, tetapi juga meletakkan pondasi menuju swasembada pangan dan pemerataan ekonomi.

Koperasi Desa (Kopdes) dirancang bukan sekadar sebagai koperasi simpan-pinjam konvensional, tetapi sebagai simpul ekosistem ekonomi lokal yang terintegrasi. Skema usaha Kopdes meliputi gudang modern, cold storage, gerai sembako, distribusi logistik, hingga lembaga keuangan mikro. Dengan keterlibatan lembaga desa seperti BUMDes, Gapoktan (gabungan kelompok tani), koperasi lokal, hingga usaha perseorangan, koperasi ini diharapkan mampu

memperkuat rantai pasok lokal dan membuka akses pasar yang lebih luas.

Menjawab Tantangan dengan Tiga Pilar: *People, Organization, System*

Namun, keberhasilan program ini sangat bergantung pada tiga pilar utama: *people*, *organization*, dan *system*. Kualitas pengurus dan anggota, tata kelola kelembagaan, serta dukungan sistem regulasi dan pembiayaan akan sangat menentukan nasib jangka panjang koperasi ini. Masih rendahnya partisipasi masyarakat, persepsi negatif terhadap koperasi, hingga tantangan digitalisasi menunjukkan perlunya pelatihan, pendampingan, dan transformasi kelembagaan secara menyeluruh.

Di balik semangat percepatan, perlu kehati-hatian agar proses pendirian Kopdes tidak menjadi sekadar formalitas administratif. Musyawarah desa sebagai forum pembentukan koperasi harus dijaga inklusivitas dan akuntabilitasnya. Risiko elite capture, manipulasi dalam struktur pengurus, hingga fraud dalam pengelolaan dana bisa merusak kepercayaan masyarakat jika tidak diantisipasi dengan sistem pengawasan yang ketat dan transparan.



Penguatan Sinergi Pemerintah Pusat dan Daerah

Pemerintah daerah memainkan peran krusial dalam mengawal keberhasilan Kopdes di lapangan. PP No. 7 Tahun 2021 menempatkan pemda sebagai ujung tombak pembinaan dan pengawasan koperasi. Namun, keterbatasan SDM, lemahnya koordinasi lintas sektoral, dan minimnya insentif fiskal sering kali menghambat peran strategis ini. Oleh karena itu, sinergi antarinstansi perlu diperkuat melalui skema pembagian tugas yang jelas dan berbasis capaian.

Koperasi Desa Merah Putih harus menjadi gerakan ekonomi rakyat yang tumbuh dari bawah, bukan proyek simbolik dari atas. Ukuran keberhasilan tidak terletak pada banyaknya koperasi yang dibentuk, melainkan pada koperasi yang aktif, sehat, dan mampu mengangkat kesejahteraan anggotanya. Pendekatan berbasis

kebutuhan riil, bukan target administratif, akan memastikan koperasi bertumbuh dengan akar yang kuat di masyarakat.

Dari Desa, Untuk Indonesia yang Mandiri dan Berdaulat

Saatnya koperasi bangkit sebagai wajah ekonomi rakyat yang modern dan berdaulat. Dengan dukungan digitalisasi, profesionalisme tata kelola, serta keberpihakan kebijakan publik, Kopdes Merah Putih dapat menjadi instrumen transformasi struktural ekonomi nasional. Gerakan ini harus dijaga kesinambungannya, agar tidak sekadar menjadi agenda politik sesaat, melainkan warisan berharga menuju Indonesia Emas 2045.

(Tulisan ini merupakan pendapat pribadi penulis dan tidak mewakili institusi tempat penulis bekerja)



Nostalgia Peradaban Palembang di Museum Balaputra Dewa

Oleh Lamhot Hasiholan Parhusip

Museum Balaputra Dewa merupakan salah satu destinasi wisata budaya dan edukasi sejarah yang menjadi kebanggaan masyarakat Kota Palembang. Museum ini juga dikenal sebagai Museum Negeri Provinsi Sumatera Selatan, yang menjadi bagian dari jaringan Museum Negeri yang terdapat di masing-masing provinsi di Indonesia.

Sebagai pusat pelestarian sejarah, Museum Balaputra Dewa menyimpan berbagai koleksi kerajinan tradisional dan artefak yang ditemukan di wilayah Sumatera Selatan, mulai dari zaman prasejarah hingga masa kolonial Belanda. Pada edisi kali ini, kita akan bernostalgia dengan menelusuri sejarah, pesona, dan kekayaan koleksi yang dimiliki museum ini.

Sejarah

Museum Balaputra Dewa dibangun pada tahun 1978 dan diresmikan pada 5 November 1984. Nama “Balaputra Dewa” diambil dari nama salah satu raja besar Kerajaan Sriwijaya yang pernah membawa kerajaan tersebut ke masa kejayaan pada abad ke-9 Masehi.

Museum ini berdiri di atas lahan seluas 23.565 meter persegi. Hingga kini, jumlah koleksi benda bersejarah yang tersimpan mencapai lebih dari 3.800 item, yang diklasifikasikan dalam 10 kategori jenis koleksi utama, seperti geologika, biologika, etnografika, arkeologika, historika, numismatika, filologika, keramologika, seni rupa dan teknologi modern.





Lokasi

Museum Balaputra Dewa terletak di pusat Kota Palembang, tepatnya di Jalan Srijaya, Kelurahan Srijaya, Kecamatan Alang-Alang Lebar, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan. Letaknya yang strategis membuat museum ini mudah diakses oleh masyarakat lokal maupun wisatawan dari luar daerah. Lokasi yang dekat dengan kawasan pendidikan dan pusat perbelanjaan juga turut menunjang kenyamanan para pengunjung.

Daya Tarik Museum Balaputra Dewa

Museum ini memiliki ragam pesona yang membuat para pengunjungnya betah untuk berlama-lama menjelajahi setiap sudutnya. Beberapa daya tarik utama yang wajib dinikmati oleh wisatawan adalah:

Rumah Limas

Salah satu ikon utama Museum Balaputra Dewa adalah Rumah Limas, rumah adat khas masyarakat Palembang. Rumah Limas yang berada di kompleks museum ini merupakan rumah asli yang telah berdiri sejak tahun 1830. Keindahan Rumah Limas bahkan diabadikan dalam uang pecahan Rp10.000 edisi tahun emisi 2005.

Keunikan Rumah Limas tampak pada atap bertingkatnya yang dilengkapi ornamen simbar—hiasan berbentuk tanaman menjalar yang dipercaya memiliki fungsi estetika sekaligus sebagai penangkal petir. Jumlah ornamen simbar ini juga memiliki makna filosofis, yaitu dua simbar melambangkan Adam dan Hawa, tiga simbar melambangkan matahari, bulan, dan bintang, empat simbar melambangkan sahabat Nabi, serta lima simbar melambangkan rukun Islam.

Tiga Ruang Pameran Utama

Museum Balaputra Dewa memiliki tiga ruangan pameran utama yang di setiap ruangnya memiliki masing-masing koleksi peninggalan sejarah.

1. Ruang pameran pertama: Menampilkan koleksi dari zaman prasejarah, termasuk keindahan bentang alam dan berbagai temuan dari aliran Sungai Musi.
2. Ruang pameran kedua: Berisi peninggalan dari masa pra-Sriwijaya, era kejayaan Kerajaan Sriwijaya, serta masa kolonial hingga revolusi nasional.
3. Ruang pameran ketiga: Didedikasikan khusus untuk kerajinan tradisional khas Sumatera Selatan, seperti kain songket, alat musik tradisional, dan peralatan rumah tangga masyarakat zaman dahulu.

Pembagian ruang ini memberikan kemudahan bagi pengunjung untuk memahami alur sejarah Sumatera Selatan secara kronologis dan mendalam.

Museum Balaputra Dewa bukan sekadar tempat menyimpan benda-benda masa lalu, melainkan jendela untuk memahami jejak peradaban dan kekayaan budaya Palembang serta Sumatera Selatan. Keberadaan museum ini menjadi sarana penting dalam memperkuat identitas sejarah lokal serta mengedukasi generasi muda akan pentingnya pelestarian warisan budaya.

Bagi kamu yang ingin menikmati wisata sejarah, edukasi, dan budaya dalam satu tempat, Museum Balaputra Dewa adalah pilihan yang tidak boleh dilewatkan!





Alat Pertanian Tradisional Kelebut dan Lesung Batu

Museum Balaputradewa juga memiliki koleksi alat pertanian tradisional yang sering digunakan oleh masyarakat Sumsel di Ogan Komering Ulu, Musi Rawas, Banyuasin, dst.

ektor pertanian, teknol
s hasil pertanian m
bahan makanan jad
asil pertanian digunaka
tra-sentra pertanian, seperti
llir, Banyuasin, dan Musi Raw
Selatan yang berhubungan
antara lain lesung batu, lesu
kayu.



Trenggalung Rumah Limas

Trenggalung merupakan ruang yang difungsikan untuk menerima tamu jika pemilik rumah sedang mengadakan hajjat.



Ayib

Handmade



08973239799

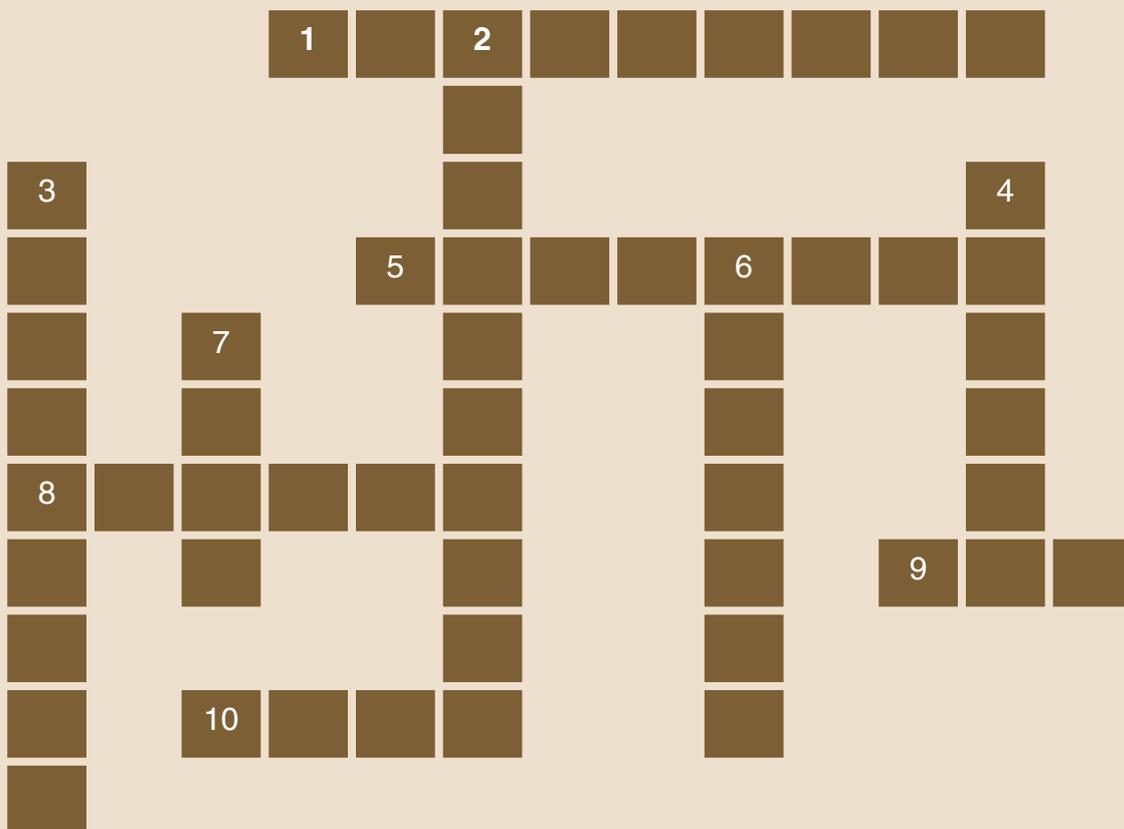
Menjual berbagai macam produk kriya dengan motif jumptan Khas Palembang





TTE

Teka-Teki Etdah~



Mendatar

1. Nama benteng bersejarah di Palembang, ikon wisata dan budaya
5. Jenis dana APBN yang dialokasikan ke desa melalui APBD kabupaten/kota.
8. Mata uang Indonesia.
10. Nama sungai besar yang mengelilingi Benteng Kuto Besak di bagian selatan.

Menurun

2. Program pembangunan strategis nasional dibidang sumber daya air di Sumsel tahun 2024.
3. Kota di Sumatera Selatan yang memiliki skor IKP rendah akibat tingginya pengeluaran pangan.
4. Buletin resmi Kanwil DJPb Sumsel yang memuat catatan dan informasi penting per triwulan.
6. Nama minuman UMKM khas Palembang yang terbuat dari dogan.
7. Komoditas khas Sumatera Selatan yang dikembangkan dalam FGD bersama Kanwil DJPb.

Yuk, kirimkan jawaban kalian ke kanwil.djpbnsumsel@kemenkeu.go.id!
Pemenang akan diumumkan di edisi tanjak berikutnya~



Jawaban TTE Edisi 13:
1. Rupiah
2. Oktober
3. Pajak
4. Jakarta
5. APBN
6. Dana Desa

Tetap
terhubung
bersama kami
dimanapun
Anda berada.



@djpbumsel



@djpbumsel



kanwildjpbsumsel



djpbumsel.kemenkeu.go.id/kanwil/sumsel/id/



ASN Bermartabat, Negara Bermartabat: Refleksi Kode Etik di Kementerian Keuangan

Oleh Yustri Marianti



Dalam dunia birokrasi modern, keberhasilan suatu institusi pemerintahan tidak hanya ditentukan oleh kebijakan dan strategi, tetapi juga oleh karakter para pelaksananya. Di sinilah pentingnya kode etik sebagai kompas moral yang menuntun sikap dan perilaku Aparatur Sipil Negara (ASN). Bagi Kementerian Keuangan Republik Indonesia (Kemenkeu RI), kode etik bukan sekadar formalitas administratif, melainkan representasi nilai luhur yang membentuk jati diri ASN bermartabat.

Seorang ASN Kemenkeu tidak hanya dituntut cakap secara intelektual, tetapi juga wajib menjunjung tinggi integritas, profesionalisme, dan tanggung jawab sosial. Melalui kode etik, Kemenkeu menanamkan lima nilai utama: **Integritas, Profesionalisme, Sinergi, Pelayanan, dan Kesempurnaan**. Nilai-nilai ini tidak hanya menjadi slogan di dinding kantor, tetapi harus tercermin nyata dalam setiap keputusan, tindakan, dan interaksi dengan publik.

ASN yang menjunjung etika akan menjaga netralitas, menghindari konflik kepentingan, dan tidak menyalahgunakan wewenang. Mereka sadar bahwa setiap langkah yang diambil akan menjadi cerminan wajah negara di mata masyarakat. Oleh karena itu, bermartabatnya seorang ASN adalah

pondasi dari citra negara yang bersih, adil, dan terpercaya.

Kementerian Keuangan secara aktif menerapkan sistem pengawasan etik melalui Unit Kepatuhan Internal dan Inspektorat Jenderal. ASN juga diwajibkan menandatangani pakta integritas sebagai wujud komitmen terhadap standar moral dan hukum. Tak hanya itu, lingkungan kerja yang kondusif, budaya transparansi, dan keterbukaan terhadap kritik menjadi bagian dari upaya membentuk karakter ASN yang kuat dan berintegritas.

Dalam konteks yang lebih luas, kode etik ASN di Kemenkeu adalah cerminan komitmen institusi terhadap tata kelola pemerintahan yang baik (good governance). ASN yang bekerja dengan integritas tinggi akan berdampak langsung pada kepercayaan masyarakat, efektivitas kebijakan fiskal, hingga stabilitas ekonomi nasional.

Dengan demikian, tak berlebihan jika dikatakan bahwa ASN bermartabat adalah jantung dari negara bermartabat. Melalui keteladanan, konsistensi, dan tanggung jawab moral, ASN Kemenkeu membuktikan bahwa pelayanan publik bukan sekadar pekerjaan, tetapi panggilan untuk menjaga marwah bangsa.



Cross Function dari Penjaga Gerbang Perekonomian Negara menjadi Pengawal Jantung Perbendaharaan Negara

Oleh Muhammad Ikhsan

Setiap lembar kalender yang berganti seringkali membawa babak baru dalam perjalanan karier seorang Aparatur Sipil Negara (ASN), tidak terkecuali bagi ASN Kementerian Keuangan. Bagi saya, babak baru ini dimulai setelah 11 tahun mengabdikan diri di Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC), dengan amanah terakhir sebagai Kepala Seksi Bantuan Hukum di Kantor Wilayah DJBC Provinsi Aceh, yang kemudian mengemban tugas sebagai Kepala Subbagian Keuangan di Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Provinsi Sumatera Selatan.

Mutasi atau perpindahan ini bukan sekadar rotasi secara geografis, melainkan mutasi antar Unit Eselon I yang dikenal dengan lintas fungsi atau *cross function*. *Cross function* merupakan pelaksanaan dari kebijakan strategis Kementerian Keuangan yang bertujuan membangun sebuah organisasi tanpa sekat (*borderless organization*). Sebuah pergeseran dari dunia DJBC yang berperan sebagai *Trade Facilitator, Industrial Assistance, Community Protector* dan *Revenue Collector* yang mengamankan penerimaan sekaligus memfasilitasi perdagangan dan melindungi masyarakat, ke dunia DJPb yang memiliki peran yang saat ini dikenal dengan TREFA (*Treasury, Regional Economist dan Financial Advisory*) yang mencakup peran pengelolaan kas negara, menganalisis kondisi ekonomi regional serta pemberian saran dan dukungan finansial kepada pemerintah daerah.

Langkah ini sejalan dengan semangat reformasi birokrasi yang terus digalakkan untuk mengikis ego sektoral atau silo-silo yang kerap menjadi tantangan. Dengan mengalami langsung proses bisnis di unit yang berbeda, seorang ASN didorong untuk memiliki perspektif yang lebih utuh, memahami bahwa setiap unit Eselon I adalah bagian dari satu mesin besar yang bekerja untuk satu tujuan yaitu menjaga dan mengelola keuangan negara secara optimal.

Perbedaan tugas dan fungsi (tusi) utama yang fundamental antara kedua unit Eselon I ini tentu menjadi tantangan tersendiri. Pengalaman sebelumnya di Kantor Pelayanan Utama (KPU) Bea dan Cukai Batam di Bidang Perbendaharaan dan Keberatan, menjadi contoh nyata. Meskipun namanya sama-sama mengandung kata 'perbendaharaan', fokusnya sangat berbeda. Di Bea Cukai, 'perbendaharaan' lebih mengarah pada sisi penerimaan negara, seperti mengelola bea masuk, bea keluar, dan cukai. Sementara di DJPb, perbendaharaan lebih mengarah kepada pengelolaan pengeluaran negara dengan cakupan tugas yang holistik pada perekonomian.

Saya juga diamanahkan sebagai Pejabat Penandatanganan Surat Perintah Membayar (PPSPM), peran tambahan yang sejalan dengan tusi Kasubbag Keuangan. Amanah ini semakin memberikan kesadaran akan peran strategis pejabat perbendaharaan sebagai garda terdepan dalam pelaksanaan anggaran.

Tugasnya adalah memastikan setiap rupiah uang negara yang dibelanjakan telah melalui proses verifikasi yang cermat, efektif, dan efisien, sehingga akuntabilitasnya terjaga dan benar-benar memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

Subbagian Keuangan dan PPSPM merupakan unit yang lazim di setiap instansi, termasuk di Bea Cukai, dimana Subbagian Keuangan memiliki tugas mengelola keuangan internal kantor, mulai dari belanja pegawai, hingga belanja barang dan modal. Namun hal yang paling istimewa dan menjadi keuntungan luar biasa bagi saya yakni berada di 'rumah'-nya. Fungsi pengelolaan keuangan satuan kerja merupakan tuis yang dibina dan menjadi keahlian utama DJPb. Ketika ada hal-hal teknis maupun non-teknis yang membutuhkan asistensi, akses untuk berdiskusi dengan para pakar menjadi lebih mudah karena berada satu atap.

Dukungan Penuh, Tanpa Sekat

Adaptasi di lingkungan baru tidak akan berjalan mulus tanpa dukungan dari sekitar. Di sinilah semangat "Kemenkeu Satu" terasa secara langsung dalam praktik. Sejak hari pertama bertugas, tidak dirasakan adanya penolakan atau resistensi dari rekan-rekan kerja. Justru sebaliknya, para pejabat dan pegawai di Kanwil DJPb Provinsi Sumatera Selatan sangat suportif. Setiap pertanyaan, baik yang bersifat teknis terkait aplikasi keuangan maupun yang lebih konseptual, selalu disambut dengan tangan terbuka.

Lingkungan kerja yang kolaboratif ini menjadi bahan bakar utama untuk terus belajar dan berakselerasi. Ini membuktikan bahwa kebijakan mutasi lintas fungsi yang digalakkan pimpinan bukan hanya bertujuan untuk pengembangan karier pegawai, tetapi juga sangat efektif dalam menghancurkan stereotip dan mengikis ego sektoral yang seringkali menjadi penghambat sinergi. Pengalaman ini menegaskan bahwa fondasi utama dari kolaborasi yang sukses adalah komunikasi yang terbuka dan akuntabilitas bersama.

Manfaat Ganda: Pertumbuhan Pribadi dan Penguatan Institusi

Perjalanan lintas fungsi ini memberikan manfaat ganda. Secara pribadi, ini adalah kesempatan emas untuk keluar dari zona nyaman dan memperluas cakrawala pengetahuan. Mempelajari ritme kerja dan proses bisnis baru secara langsung mengasah kemampuan beradaptasi dan keterampilan manajemen. Ini adalah bentuk pengembangan kompetensi yang tidak ternilai, yang membentuk ASN menjadi lebih dinamis dan siap menghadapi berbagai tantangan.

Bagi institusi, kebijakan ini menciptakan "jembatan manusia" antar unit Eselon I. Pegawai yang berpindah membawa serta pemahaman, jejaring, dan empati terhadap unit lamanya. Hal ini secara perlahan namun pasti akan meruntuhkan dinding-dinding silo yang kaku, memicu lahirnya ide-ide inovatif, dan pada akhirnya meningkatkan efektivitas layanan publik secara keseluruhan.

Perjalanan ini lebih dari sekadar perpindahan jabatan. Ini adalah sebuah kesempatan untuk bertumbuh, memperluas wawasan, dan membangun pemahaman yang lebih holistik mengenai siklus keuangan negara. Harapannya, kebijakan strategis seperti rotasi lintas fungsi ini akan terus memperkuat institusi, menciptakan insan-insan Kemenkeu yang dinamis dan adaptif, serta membangun sebuah Kementerian Keuangan yang lebih terintegrasi dan solid dalam menghadapi setiap tantangan bangsa.

KOMIK TANJAK

Ep 08: Cara Pintar *Pegawai Pintar*

Oleh M. Telly Anggra Syaputra

Senin pagi di Kantor..
Jaki melihat Daniel yang sedang merenung keras.

OI, NIEL.
PAGI-PAGI LDAH
SERIUS SAJA..

HMM...
IYA JAK, GW SEDANG
RESAH AKAN SESUATU..
EMANG LU NGGAK?

EMANG APA?



LU NGGAK CEMAS APA?
KEMAJUAN TEKNOLOGI MAKIN
PESAT? TENAGA MANUSIA MULAI
DIGANTIKAN OLEH MESIN?
MEMANGNYA KITA SEMUA SIAP
DENGAN INI?

BELUM LAGI JIKA
ORGANISASI BICARA
EFISIENSI. MANA TAU KE
DEPAN KITA NGGAK
DIGUNAKAN. TERUS, KITA
MALU GIMANA JAK?

BERAT BANGET
DAH..

GINI AJA NIEL. COBA SAMPAIKAN
ASPIRASI LU DENGAN SALURAN
PINTAR KEMENKELU.

COBA MELALUI TALUTAN

[HTTPS://KEMENKELU.SHAREP
OINT.COM/SITES/PINTAR](https://kemenkelu.sharepoint.com/sites/pintar)

AMAN KOK, RAHASIA DAN
TIDAK BOCOR. BISA
MENGUNAKAN ANONIM.

WAAAH BOLEH
TUH..

PEGAWAI PINTAR
SAMPAIKAN ASPIRASINYA
LEWAT SALURAN PINTAR!

LEBIH AMAN, MUDAH DAN
DIJAGA KERAHASIAANNYA.
WAH.. KALAU BEGINI BISA
LEGA.



Kilas Balik: Triwulan II 2025

15 APR | DISKUSI DWIMINGGUAN BERSAMA PEJABAT ADMINISTRATOR

Dalam rangka memperkuat peran sebagai Financial Advisor, Kepala Kanwil DJPb Sumsel mengadakan diskusi rutin bersama para pejabat administrator. Diskusi ini menjadi ruang reflektif untuk membahas isu-isu ekonomi terkini sekaligus melatih cara pandang ekonomis dalam merespons dinamika yang berkembang. Langkah ini diharapkan dapat memperkaya perspektif dan ketajaman analisis jajaran Kanwil DJPb Sumsel.



30 APR | PRESS RELEASE APBN KITA SUMSEL TRIWULAN I 2025

Forum ALCo Sumsel yang dihadiri seluruh kantor vertikal Kementerian Keuangan melaporkan bahwa kinerja pelaksanaan APBN di Sumatera Selatan pada Triwulan I 2025 tumbuh positif, didukung penerimaan pajak, bea cukai, dan PNBP yang meningkat. Dari sisi belanja, penyaluran TKD juga mengalami akselerasi, terutama Dana Desa dan DAU, yang memperkuat dukungan fiskal pusat terhadap pemda di Sumsel.



8 MEI | KICK OFF JELAJAH KOPI & TALKSHOW

Kegiatan bertema “Sinergi Dunia Usaha Menuju Ekonomi Berkelanjutan dan Inovatif” ini merupakan salah satu bentuk kolaborasi untuk memajukan daya saing kopi Sumsel. Kepala Kanwil DJPb Sumsel menyampaikan pentingnya pembiayaan pemerintah seperti Kredit Usaha Rakyat (KUR), khususnya untuk sektor alat dan mesin pertanian (Alsintan).



16 MEI | BIDIK: GENERASI BERKUALITAS, BERINTEGRITAS, DAN ANTI KORUPSI

Kegiatan BIDiK (Belajar Integritas sejak dari Kecil) kembali digelar. Kali ini, BIDiK bertempat di Pondok Pesantren Ash-Shiddiqin, dengan sasaran para santri untuk mengenal nilai-nilai kejujuran, tanggung jawab, dan menolak perilaku koruptif. Kanwil DJPb Sumsel juga menyerahkan hibah berupa komputer kepada pihak pondok pesantren.





20 MEI | FGD DIGITALISASI PEMBAYARAN TAHUN 2025

Selaku financial advisor, Kanwil DJPb Sumsel berkolaborasi dengan KPPN Sekayu untuk melaksanakan FGD bersama satker dan mitra perbankan digelar untuk membahas perkembangan digitalisasi pembayaran di 2025 (CMS, KKP, Digipay Satu). Kegiatan ini menjadi ajang identifikasi tantangan sekaligus penguatan sinergi pelaksanaan anggaran yang makin adaptif dan digital.

26 MEI | BIMTEK IKPA, PEMBINAAN DAN PENDAMPINGAN PELAKSANAAN ANGGARAN, DAN PENGELOLAAN BMN

Kepala Kanwil DJPb Sumsel hadir sebagai narasumber dalam bimtek bersama BKKBN Sumsel. Materi difokuskan pada optimalisasi pelaksanaan anggaran dan penguatan tata kelola keuangan yang efisien dan akuntabel. Sinergi lintas lembaga ini jadi langkah nyata wujudkan APBN yang berkualitas dan berdampak.



8 JUNI | IBADAH KURBAN KEMENKEU SUMSEL

Dalam semangat Idul Adha 1446 H, Kemenkeu Satu Sumsel melaksanakan ibadah kurban. Sebanyak 4 ekor sapi dan 2 ekor kambing dikurbankan, dan dagingnya disalurkan kepada para mustahik serta para PPNPN. Kegiatan ini menjadi wujud kebersamaan dan kepedulian antar insan Kemenkeu.



17 JUNI | EDUKOM REKONSILIASI PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN UAPPA-W SEM I 2025

Kanwil DJPb Sumsel menyelenggarakan kegiatan edukasi dan komunikasi persiapan rekonsiliasi & penyusunan LK UAPPA-W Semester I 2025. Kegiatan ini dihadiri 37 satker dan narasumber dari Dit APK, kegiatan ini memperkuat kapasitas pelaporan keuangan agar makin cepat, akurat, dan akuntabel.



19 JUNI | DISEMINASI KFR: PERAN DAN STRATEGI PENGEMBANGAN KOPERASI DI DAERAH

Diseminasi KFR periode triwulan I 2025 digelar dengan berkolaborasi bersama BDK Palembang. Kegiatan ini menghadirkan narasumber dari Kementerian Koperasi dan UKM Republik Indonesia, Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sumatera Selatan, serta Local Expert Kemenkeu Sumsel yang memaparkan arah kebijakan nasional, tantangan aktual, dan strategi penguatan koperasi sebagai bagian penting dari penggerak ekonomi rakyat.





25 JUNI | PENGUATAN UMKM LEWAT PELATIHAN PEMBUKUAN DIGITAL UNTUK KADER PKK

Dalam upaya mendorong literasi keuangan dan pemberdayaan ekonomi masyarakat, Kanwil DJPb Provinsi Sumatera Selatan turut ambil bagian sebagai narasumber dalam kegiatan Pelatihan Peningkatan Kapasitas Kader Pokja II TP PKK Provinsi Sumatera Selatan. Kegiatan ini merupakan wujud nyata sinergi lintas institusi antara DJPb dan TP PKK Provinsi Sumsel dalam membangun ekosistem UMKM yang lebih adaptif, transparan, dan kompetitif di tengah era digitalisasi.

30 JUNI | SHARING SESSION ZONA INTEGRITAS WBBM BERSAMA BPS SUMSEL

Kanwil DJPb Provinsi Sumsel melakukan sharing session mengenai *best practice* dalam meraih predikat WBBM (Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani) bersama dengan BPS Provinsi Sumsel. Kunjungan ini menjadi wujud nyata dari *island of integrity* yang mendorong kolaborasi antar instansi untuk menularkan semangat reformasi birokrasi yang akuntabel, berdampak, dan berkelanjutan.





**Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan
Provinsi Sumatera Selatan**

**Jl. Kapten A. Rival No. 2, Sungai Pangeran, Kec. Ilir Timur I Kota
Palembang, Sumatera Selatan 30129**